MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/Permentan/RC.240/5/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai diperlukan penyediaan prasarana dan sarana fisik dasar pertanian untuk kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) Bidang Pertanian Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, mengamanatkan menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 3

(1) Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.
(2) Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota meliputi:
    (a) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
    (b) Pengembangan jaringan irigasi tersier;
    (c) Pengembangan sumber air untuk irigasi, dengan sub kegiatan: irigasi air tanah, irigasi air permukaan, embung dan dam parit; dan
    (d) Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

Pasal 4

(1) Dana pendamping fisik sebesar 0 %.

(2) Dana penunjang non fisik maksimal sebesar 5 % dari pagu alokasi DAK yang diterima meliputi perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

(3) Proporsi anggaran masing-masing kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota meliputi:

(a) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebesar 15-25% dari pagu alokasi;

(b) Pengembangan jaringan irigasi tersier sebesar 15-25% dari pagu alokasi;

(c) Pengembangan sumber air untuk irigasi, dengan sub kegiatan: irigasi air tanah, irigasi air permukaan, embung dan dam parit sebesar 35-45% dari pagu alokasi; dan

(d) Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani sebesar 10-20% dari pagu alokasi.

Pasal 5

Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kegiatan wajib, sehingga daerah harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran.

Pasal 6

Kegiatan pengembangan sumber air untuk irigasi dengan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (c) merupakan sub kegiatan pilihan sehingga daerah dapat memilih 1 (satu) atau beberapa sub kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah.

Pasal 7

Besarnya pagu alokasi Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota setiap daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penanggungjawab dan pengelola Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 yaitu Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan.

Pasal 9

Di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

Pasal 10

Kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan menerbitkan peraturan Kepala Daerah (bupati/walikota) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Gubernur Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30/Permentan/RC.240/5/2015
TANGGAL : 18 Mei 2015

# PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015

## BAB I
## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabinet Kerja telah menetapkan swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai harus dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun. Target produksi tahun 2015 untuk padi sebesar 73,4 juta ton, jagung sebesar 20,3 juta ton dan kedelai sebesar 0,92 juta ton. Target produksi tahun 2016 untuk padi sebesar 76,2 juta ton, jagung sebesar 21,4 juta ton dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Target Produksi Tahun 2017 untuk padi sebesar 78,1 juta ton, jagung sebesar 22,4 juta ton dan kedelai sebesar 2,03 juta ton.

Dalam pencapaian swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai, lahan merupakan salah satu faktor produksi utama yang tidak tergantikan. Berdasarkan hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas baku sawah 8.132.346 hektar. Indeks Pertanaman rata-rata nasional 140% dan produktivitas rata-rata nasional padi 5,13 ton/ha, jagung 4,93 ton/ha dan kedelai 1,51 ton/ha (ASEM BPS 2014).

Selain itu ketersediaan air khususnya irigasi sangat menentukan keberhasilan swasembada tersebut. Menurut Keputusan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 293/KPTS/M/2014 tanggal 10 Juni 2014, sawah yang mempunyai jaringan irigasi seluas 7.145.168 hektar dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 3.288.993 hektar serta kerusakan jaringan tersier seluas 2.069.484 hektar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi, tanggung jawab pengelolaan jaringan primer dan sekunder terbagi menjadi tiga kewenangan yaitu: Pemerintah Pusat (Kementerian PU dan Perumahan Rakyat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani.

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (losses); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi enam tepat; (6) lemahnya permodalan petani, (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.

Kementerian Pertanian telah menetapkan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi dan pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota dan acuan penyusunan RKA/DPA DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.
2. Tujuan pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk:
   a. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pertanian berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembagan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi dan pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani.
   b. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau produktivitas pada lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan kering, lahan rawa pasang surut dan lahan rawa lebak untuk mendukung pencapaian Swasembada Padi dan Peningkatan Produksi Jagung dan Kedelai.

C. Sasaran

Sasaran pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) padi minimal sebesar 0,5 dan produktivitas padi minimal sebesar 0,2 Ton/Ha GKP.
2. Tercapainya produktivitas jagung minimal sebesar 4 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 0,5 ton/Ha pada areal *existing*.
3. Tercapainya produktivitas kedelai minimal sebesar 1 Ton/Ha pada areal tanam baru dan meningkatnya produktivitas kedelai sebesar 0,2 ton/Ha pada areal *existing*.

D. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 yaitu Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 meliputi:

1. Kebijakan dan kegiatan pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota;
2. Kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota; dan
3. Pembinaan dan Pelaporan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota.

## BAB II
## KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAK TAMBAHAN P3K2 BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015 DI KABUPATEN/KOTA

A. Kebijakan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota

Kebijakan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota yaitu adanya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk mendukung pencapaian Swasembada Padi dan Peningkatan Produksi Jagung dan Kedelai pada tahun ke-3 (tiga) Kabinet Kerja melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembagan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi dan pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

B. Kegiatan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota digunakan untuk: (1) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, (2) Pengembangan jaringan irigasi tersier, (3) Pengembangan Sumber air untuk irigasi mencakup irigasi air tanah, irigasi air permukaan, embung dan Dam Parit, (4) Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani.

C. Perencanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota

Perencanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota menggunakan Aplikasi *e-Proposal* terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan anggaran serta data teknis untuk menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian.
Dalam rangka meningkatkan kualitas proposal yang diajukan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan kabupaten/kota, maka dalam *e-Proposal* dilengkapi dengan format usulan kegiatan dan anggaran serta *data teknis.*

D. Persyaratan pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di kabupaten/kota wajib menyiapkan dana pendamping fisik sebesar 0 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Alokasi Dana Penunjang Non Fisik maksimal sebesar 5% diambil dari pagu alokasi DAK yang diterima. Penggunaan dana penunjang non fisik antara lain untuk: desain perencanaan, konsultan pengawas, identifikasi CPCL, biaya tender, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 di Kabupaten/Kota

1. Penyusunan RKA/DPA secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.
2. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah.
3. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 harus mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
4. Barang/asset daerah yang bersumber dari anggaran DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat diserahkan kepada Organisasi kemasyarakatan atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan/atau P3A apabila dianggap lebih efisien, efektif dan bermanfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyerahan barang/asset daerah diikat dalam Naskah Perjanjian Serah Terima Barang antara Bupati/Walikota atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan Organisasi kemasyarakatan atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan/atau P3A sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III
## KEGIATAN DAK TAMBAHAN P3K2 BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015 KABUPATEN/KOTA

A. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi yaitu kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah (Pusat, provinsi dan kabupaten/kota), irigasi desa dan/atau daerah rawa yang memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi

   Beberapa hal yang harus diperhatikan:

   a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pembangunan.

   b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.

   c. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS – BT/BB) di tiga titik (titik awal, tengah dan ujung).

   d. Untuk konstruksi bangunan saluran, diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak dimungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu atau pipa paralon.

   e. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier.

   Kegiatan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi:

   1) Merehabilitasi jaringan irigasi tersier meliputi: saluran pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*) serta bangunan lainnya (boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong-gorong).

   2) Merehabilitasi bangunan penangkap air meliputi bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapnya.

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Rawa

   a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pembangunan.

   b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik dan tersedia melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.

   c. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).

   d. Diutamakan pada rawa pasang surut dengan tipe luapan B dan C dan rawa lebak.

   e. Lebar saluran disesuaikan dengan besarnya luapan dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran).

   f. Untuk konstruksi bangunan saluran, diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak dimungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu atau pipa paralon.

   g. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier.

B. Pengembangan Jaringan Irigasi

Pengembangan Jaringan Irigasi yaitu pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah (Pusat, provinsi dan kabupaten/kota), irigasi desa dan/atau daerah rawa yang memerlukan pengembangan jaringan irigasi tersier.

1. Pengembangan Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan:

a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya memerlukan pembangunan/peningkatan.
b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
c. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS – BT/BB) di tiga titik (titik awal, tengah dan ujung).
d. Untuk konstruksi bangunan saluran, diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak dimungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu atau pipa paralon.

Kegiatan konstruksi pengembangan jaringan irigasi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi:

1) Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi tersier meliputi: saluran pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*) serta bangunan lainnya (boks bagi, siphon, talang, bangunan terjun, gorong – gorong).
2) Pembangunan/peningkatan bangunan penangkap air, seperti bendung sederhana dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan pelengkapnya.

2. Pengembangan Jaringan irigasi di Daerah Rawa

a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan pembangunan.
b. Jaringan primer, sekunder dan/atau sumber air dalam kondisi baik dan tersedia melalui koordinasi dengan Dinas/Balai lingkup pengairan sesuai kewenangan Daerah Irigasinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
c. Lokasi dilengkapi dengan posisi koordinatnya (LU/LS – BT/BB).
d. Diutamakan pada rawa pasang surut dengan tipe luapan B dan C dan rawa lebak.
e. Lebar saluran disesuaikan dengan besarnya luapan dan luas lahan sawah yang akan diairi (luas oncoran).

f. Untuk konstruksi bangunan saluran, diutamakan dari bahan ferosemen agar lebih ekonomis, mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya. Saluran ferosemen ini dibuat dengan ukuran atau dimensi sesuai dengan kondisi lapangan (debit air dan luas oncoran). Apabila tidak dimungkinkan dengan bahan ferosemen maka dapat diganti dengan pasangan batu atau pipa paralon.

g. Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan/P3A berada pada satu hamparan blok tersier.

C. Pengembangan Sumber Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan

Penyediaan sumber air yang dialokasikan dalam DAK Tambahan P3K2 diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan irigasi air tanah, pembangunan irigasi air permukaan pembangunan embung dan dam parit dalam kerangka konservasi air antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung usaha tanaman pangan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan desain perencanaan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

1. Irigasi Air Tanah

Kegiatan irigasi air tanah merupakan pemanfaatan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain: (1) sumur bor/sumur gali; (2) pompa air dan perlengkapannya; (3) rumah pompa dan (4) Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:

a. Pembangunan sumur dengan cara pengeboran/penggalian yang mempunyai potensi air tanah cukup baik;

b. Pompa air dan perlengkapannya: menggunakan jenis pompa *sentrifugal* ataupun *submersible*, yang digerakkan dengan penggerak motor yang berbahan bakar bensin/solar, motor listrik ataupun tenaga surya;

c. Rumah Pompa: berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat untuk menahan getaran mesin dengan pengamanan yang baik untuk pompa yang berkapasitas besar atau disesuaikan dengan kebutuhan;

d. Jaringan irigasi air tanah (JIAT) untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani.

2. Irigasi Air Permukaan

Kegiatan Irigasi Air Permukaan merupakan pemanfaatan air permukaan (sungai, danau, mata air, air bekas galian tambang dan air terjun), dimana di lokasi yang bersangkutan mempunyai potensi air baik kuantitas maupun kualitasnya.

Beberapa pilihan alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pembangunan Irigasi Air Permukaan adalah sebagai berikut:(1) pompanisasi (2) hidran (3) pipanisasi (4) kincir air (5) bendung kecil dengan uraian sebagai berikut:

a. Pompanisasi: yaitu upaya mengambil air dari sumber air permukaan yang diangkat dan didistribusikan dengan mempergunakan pompa air dan didistribusikan dengan saluran terbuka atau saluran tertutup. Komponen dalam kegiatan ini adalah: mesin pompa air, pipa/selang hisap/buang, saluran distribusi, rumah pompa apabila pompa dalam posisi tetap/stationer atau alat pengangkut apabila dalam penggunaan pompa akan berpindah-pindah/mobile. Sumber tenaga bagi pompa air ini dapat menggunakan bahan bakar bensin/solar, listrik, kincir angin ataupun panel surya.

b. Hidram: yaitu upaya mengambil air dari sumber air permukaan (sungai, danau dll), dengan menaikkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi dari sumber air. Sistem ini menggunakan prinsip memanfaatkan beda tinggi dan tekanan air.

c. Pipanisasi: yaitu upaya untuk menyalurkan sumber air permukaan dengan menggunakan pipa, dimana dalam penyalurannya dapat menggunakan pompa ataupun memanfaatkan gaya gravitasi.

d. Kincir air: yaitu upaya untuk menaikkan sumber air permukaan dengan memanfaatkan tenaga dari aliran/arus air. Pada umumnya kincir air terdiri dari poros, lingkaran roda yang dilengkapi dengan tabung dan sudu-sudu yang dipasang disekeliling roda.

e. Bendung Kecil: dibangun dengan tujuan untuk menampung aliran air (sungai/kali) dan meninggikan muka aliran air agar dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air terutama pada musim kemarau untuk irigasi/penambahan luas areal tanam.

Beberapa kegiatan pembangunan irigasi air permukaan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Embung

Embung yaitu bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari embung tersebut, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian.

Dalam pembangunan embung yang dibiayai melalui DAK Tambahan P3K2 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Lokasi, sesuai dengan peruntukan dan harus dapat memenuhi kaidah-kaidah konservasi air dan upaya kelestarian lingkungan;

b. Lahan yang digunakan untuk pembangunan embung merupakan lahan bebas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan Bupati/WaliKota;

c. Kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan embung tidak *porous* dan merupakan daerah pertanian tanaman pangan yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi. Bila kondisi tanah lokasi embung *porous* maka dasar embung harus dilapis (linning/plastik/tanah liat/geotekstil);

d. Bangunan embung dapat menampung air sebagai suplesi air irigasi dengan kapasitas penampungan air yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang tersedia.

e. Bangunan embung terdiri dari kolam penampung air , saluran pemasukan (jika sumber air berasal dari aliran permukaan), saluran pengeluaran (jika diperlukan).

Sebagai bangunan suplesi, pemanfaatan airnya bisa dari embung dibuatkan saluran irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu pengeluaran sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.

4. Dam Parit

Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air.

Dalam pembangunan dam parit yang dibiayai melalui DAK Tambahan P3K2 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dam parit dibangun dengan membendung aliran untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;

b. Elevasi lahan usaha tani harus berada dibawah dam parit;

c. Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;

d. Bangunan dam parit terdiri dari talud/jagaan (*free board*), bangunan bendung/pelimpas, pintu penguras, saluran irigasi, dan kolam olak.

e. Kontruksi dam parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang.

D. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani yaitu prasarana transportasi pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

Pembangunan/Rehabilitasi JUT dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembuatan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan;

b. Peningkatan kapasitas jalan usaha tani yaitu jalan usaha tani yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar;

c. Rehabilitasi jalan usaha tani yaitu memperbaiki kualitas jalan usaha tani yang sudah rusak tanpa peningkatan kapasitas.

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani yang dibiayai melalui DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sesuai dengan standar teknis sebagai berikut:

1. Lokasi Jalan Usaha Tani berada pada sentra produksi padi, jagung dan kedelai (bukan jalan desa).
2. Lokasi pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani dilengkapi dengan posisi koordinat (LU/LS – BT/BB) di tiga titik (titik awal, tengah dan ujung);
3. Badan Jalan Usaha Tani dilapisi batu koral atau pasir-batu (sirtu), lalu dilakukan pemadatan.
4. Lebar Badan Jalan Usaha Tani maksimal 2,5 m.
5. Komponen jalan usaha tani (bahu jalan, badan jalan, saluran *drainase,* gorong-gorong dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

## BAB IV
## PEMBINAAN DAN PELAPORAN DAK TAMBAHAN P3K2 BIDANG PERTANIAN TAHUN 2015 DI KABUPATEN/KOTA

A. Pembinaan

1. Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan bersama-sama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.
2. Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan provinsi melakukan pembinaan kepada Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015.
3. Kepala Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan kabupaten/kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan provinsi dalam menyusun RKA - DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 untuk mensinergikan terhadap program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.
4. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan kabupaten/kota disampaikan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan Bupati/Walikota dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun *softcopy* dan *hardcopy* dapat dikirim melalui Fax. (021)–78839618 dan atau *email* ke: pa.kementan@gmail.com.
5. Biaya pembinaan, penyusunan data teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 oleh Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan kabupaten/kota dibebankan pada pagu alokasi DAK.

B. Pelaporan

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tanaman pangan kabupaten/kota sebagai pelaksana DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi anggaran dan fisik pelaksanaan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 secara resmi melalui aplikasi yang dapat di akses ke alamat webesite: *e*monevdak.pertanian.go.id Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Laporan dalam bentuk *hard copy* dan atau *soft copy* disampaikan juga kepada Bupati/Walikota terkait, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
3. Format laporan triwulanan mengacu pada format yang tertuang dalam format laporan triwulanan sesuai Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE-1722/MK.07/2008 dan Nomor 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
4. Format laporan tahunan mengacu pada format yang tertuang dalam panduan penyusunan laporan akhir DAK Bidang Pertanian sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-822/RC.240/A/03/2015 tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2015.
5. Laporan triwulanan melalui aplikasi yang dapat di akses ke alamat webesite: *e*monevdak.pertanian.go.id dengan jadwal sebagai berikut:
   a. Untuk triwulan I (Januari – Maret) paling lambat diterima minggu pertama April;
   b. Untuk triwulan II (April – Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
   c. Untuk triwulan III (Juli – September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
   d. Untuk triwulan IV (Oktober – Desember) paling lambat diterima minggu pertama januari tahun berikutnya; dan
   e. Format laporan triwulan dan tahunan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sesuai dengan format laporan yang tercantum dalam aplikasi yang dapat di akses ke alamat webesite: *e*monevdak.pertanian.go.id Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
6. Laporan tahunan disampaikan melalui aplikasi yang dapat di akses ke alamat webesite: *e*monevdak.pertanian.go.id Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat diterima akhir bulan Januari tahun berikutnya, memuat gambaran umum, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) dari kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dan realisasi anggaran, hambatan, dan masalah yang dihadapi, serta saran perbaikan.

## BAB V
## PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 merupakan kegiatan wajib, Bupati/Walikota wajib melaksanakan semua kegiatan DAK Tambahan tersebut.

Agar pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 dapat berdaya dan berhasil guna, kegiatan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Tugas Pembantuan, APBD Kabupaten/Kota serta sumber-sumber dana lainnya).

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Tabel

PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA TAHUN ANGGARAN 2015
UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BIDANG PERTANIAN

(dalam rupiah)

| NO | DAERAH | ALOKASI |
|---|---|---|
| | | |
| | PROVINSI ACEH | |
| 1 | Kab. Aceh Besar | 15.456.200.000 |
| 2 | Kab. Aceh Selatan | 12.569.800.000 |
| 3 | Kab. Aceh Tengah | 11.656.800.000 |
| 4 | Kab. Aceh Tenggara | 13.269.900.000 |
| 5 | Kab. Aceh Timur | 16.310.300.000 |
| 6 | Kab. Aceh Utara | 22.644.400.000 |
| 7 | Kab. Bireuen | 15.401.600.000 |
| 8 | Kab. Pidie | 16.857.200.000 |
| 9 | Kota Lhokseumawe | 4.432.000.000 |
| 10 | Kab. Nagan Raya | 15.246.600.000 |
| 11 | Kab. Aceh Jaya | 11.989.400.000 |
| 12 | Kab. Aceh Barat Daya | 15.269.700.000 |
| 13 | Kab. Gayo Lues | 11.189.100.000 |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | 12.790.000.000 |
| 15 | Kab. Bener Meriah | 11.016.700.000 |
| 16 | Kab. Pidie Jaya | 12.284.100.000 |
| | Jumlah | 218.383.800.000 |
| | PROVINSI SUMATERA UTARA | |
| 17 | Kab. Asahan | 12.950.000.000 |
| 18 | Kab. Karo | 13.696.300.000 |
| 19 | Kab. Langkat | 16.355.200.000 |
| 20 | Kab. Nias | 11.761.200.000 |
| 21 | Kab. Simalungun | 20.342.900.000 |
| 22 | Kab. Tapanuli Selatan | 14.090.300.000 |
| 23 | Kab. Tapanuli Tengah | 12.858.600.000 |
| 24 | Kab. Tapanuli Utara | 12.967.300.000 |
| 25 | Kab. Toba Samosir | 14.619.100.000 |
| 26 | Kota Pematang Siantar | 4.485.300.000 |
| 27 | Kab. Pakpak Bharat | 10.879.500.000 |
| 28 | Kab. Nias Selatan | 12.172.600.000 |
| 29 | Kab. Humbang Hasundutan | 13.469.700.000 |
| 30 | Kab. Serdang Bedagai | 20.454.300.000 |
| 31 | Kab. Nias Barat | 10.328.300.000 |
| | Jumlah | 201.430.600.000 |

| | | |
|---|---|---|
| | PROVINSI SUMATERA BARAT | |
| 32 | Kab. Limapuluh Kota | 15.821.600.000 |
| 33 | Kab. Agam | 17.343.600.000 |
| 34 | Kab. Padang Pariaman | 16.771.300.000 |
| 35 | Kab. Pasaman | 15.799.300.000 |
| 36 | Kab. Pesisir Selatan | 18.398.300.000 |
| 37 | Kab. Sijunjung | 11.947.400.000 |
| 38 | Kab. Solok | 16.558.100.000 |
| 39 | Kab. Tanah Datar | 15.990.600.000 |
| 40 | Kota Padang | 6.167.100.000 |
| 41 | Kota Payakumbuh | 4.800.900.000 |
| 42 | Kota Sawahlunto | 4.398.200.000 |
| 43 | Kota Solok | 4.283.200.000 |
| 44 | Kota Pariaman | 4.674.500.000 |
| 45 | Kab. Pasaman Barat | 13.990.800.000 |
| 46 | Kab. Dharmasraya | 11.963.600.000 |
| 47 | Kab. Solok Selatan | 12.989.500.000 |
| | Jumlah | 191.898.000.000 |
| | PROVINSI RIAU | |
| 48 | Kab. Kampar | 11.479.200.000 |
| 49 | Kab. Rokan Hulu | 10.884.800.000 |
| | Jumlah | 22.364.000.000 |
| | PROVINSI JAMBI | |
| 50 | Kab. Merangin | 11.945.100.000 |
| 51 | Kab. Sarolangun | 11.048.200.000 |
| | Jumlah | 22.993.300.000 |
| | PROVINSI SUMATERA SELATAN | |
| 52 | Kab. Lahat | 13.722.000.000 |
| 53 | Kab. Musi Rawas | 16.767.100.000 |
| 54 | Kab. Muara Enim | 13.641.000.000 |
| 55 | Kab. Ogan Komering Ilir | 29.150.100.000 |
| 56 | Kab. Ogan Komering Ulu | 10.989.500.000 |
| 57 | Kota Lubuk Linggau | 4.573.800.000 |
| 58 | Kab. Banyuasin | 47.932.900.000 |
| | Jumlah | 136.776.400.000 |
| | PROVINSI BANGKA BELITUNG | |
| 59 | Kab. Bangka Selatan | 11.145.500.000 |
| | Jumlah | 11.145.500.000 |
| | PROVINSI BENGKULU | |
| 60 | Kab. Bengkulu Utara | 12.384.900.000 |
| 61 | Kab. Rejang Lebong | 13.000.000.000 |
| 62 | Kab. Kaur | 12.160.600.000 |
| 63 | Kab. Seluma | 13.520.700.000 |
| 64 | Kab. Mukomuko | 11.980.400.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 65 | Kab. Lebong | 12.366.100.000 |
| 66 | Kab. Bengkulu Tengah | 11.323.600.000 |
| | Jumlah | 86.736.300.000 |
| | PROVINSI LAMPUNG | |
| 67 | Kab. Lampung Barat | 12.474.800.000 |
| 68 | Kab. Lampung Tengah | 29.181.300.000 |
| 69 | Kab. Lampung Timur | 24.260.500.000 |
| 70 | Kab. Tanggamus | 15.410.100.000 |
| 71 | Kab. Way Kanan | 13.925.800.000 |
| 72 | Kota Metro | 4.872.000.000 |
| 73 | Kab. Pringsewu | 12.854.100.000 |
| 74 | Kab. Tulang Bawang Barat | 13.214.600.000 |
| 75 | Kab. Pesisir Barat | 11.961.800.000 |
| | Jumlah | 138.155.000.000 |
| | PROVINSI JAWA BARAT | |
| 76 | Kab. Bandung | 22.620.500.000 |
| 77 | Kab. Bekasi | 30.423.800.000 |
| 78 | Kab. Ciamis | 21.764.900.000 |
| 79 | Kab. Cianjur | 23.532.000.000 |
| 80 | Kab. Cirebon | 25.278.500.000 |
| 81 | Kab. Garut | 24.436.100.000 |
| 82 | Kab. Indramayu | 46.054.200.000 |
| 83 | Kab. Karawang | 43.650.700.000 |
| 84 | Kab. Kuningan | 17.879.900.000 |
| 85 | Kab. Purwakarta | 14.619.100.000 |
| 86 | Kab. Subang | 37.175.300.000 |
| 87 | Kab. Sukabumi | 22.512.600.000 |
| 88 | Kab. Sumedang | 18.377.300.000 |
| 89 | Kab. Tasikmalaya | 22.112.100.000 |
| 90 | Kota Bandung | 4.483.400.000 |
| 91 | Kota Tasikmalaya | 5.741.400.000 |
| 92 | Kab. Bandung Barat | 14.082.800.000 |
| 93 | Kab. Pangandaran | 13.952.400.000 |
| | Jumlah | 408.697.000.000 |
| | PROVINSI BANTEN | |
| 94 | Kab. Lebak | 19.733.500.000 |
| 95 | Kab. Pandeglang | 23.670.800.000 |
| 96 | Kab. Serang | 23.475.800.000 |
| 97 | Kota Cilegon | 4.483.900.000 |
| 98 | Kota Serang | 6.373.700.000 |
| | Jumlah | 77.737.700.000 |
| | PROVINSI JAWA TENGAH | |
| 99 | Kab. Banjarnegara | 13.337.200.000 |
| 100 | Kab. Banyumas | 17.905.700.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 101 | Kab. Blora | 23.450.300.000 |
| 102 | Kab. Boyolali | 19.327.000.000 |
| 103 | Kab. Brebes | 27.748.900.000 |
| 104 | Kab. Cilacap | 29.639.900.000 |
| 105 | Kab. Demak | 28.087.100.000 |
| 106 | Kab. Grobogan | 35.936.500.000 |
| 107 | Kab. Jepara | 17.823.900.000 |
| 108 | Kab. Karanganyar | 16.336.400.000 |
| 109 | Kab. Kebumen | 20.601.700.000 |
| 110 | Kab. Klaten | 19.172.600.000 |
| 111 | Kab. Kudus | 15.479.500.000 |
| 112 | Kab. Magelang | 16.969.600.000 |
| 113 | Kab. Pati | 29.480.300.000 |
| 114 | Kab. Pekalongan | 15.924.700.000 |
| 115 | Kab. Pemalang | 20.458.100.000 |
| 116 | Kab. Purbalingga | 14.657.700.000 |
| 117 | Kab. Purworejo | 18.044.500.000 |
| 118 | Kab. Rembang | 19.399.800.000 |
| 119 | Kab. Semarang | 14.720.200.000 |
| 120 | Kab. Sragen | 24.944.800.000 |
| 121 | Kab. Sukoharjo | 17.426.900.000 |
| 122 | Kab. Tegal | 19.946.200.000 |
| 123 | Kab. Temanggung | 14.171.400.000 |
| 124 | Kota Pekalongan | 4.244.600.000 |
| 125 | Kota Semarang | 4.787.600.000 |
| | Jumlah | 520.023.100.000 |
| | PROVINSI DI. YOGYAKARTA | |
| 126 | Kab. Bantul | 14.070.100.000 |
| 127 | Kab. Gunung Kidul | 15.247.400.000 |
| 128 | Kab. Sleman | 15.635.200.000 |
| | Jumlah | 44.952.700.000 |
| | PROVINSI JAWA TIMUR | |
| 129 | Kab. Bangkalan | 18.674.800.000 |
| 130 | Kab. Banyuwangi | 23.469.100.000 |
| 131 | Kab. Blitar | 17.232.000.000 |
| 132 | Kab. Bojonegoro | 30.040.900.000 |
| 133 | Kab. Bondowoso | 20.352.300.000 |
| 134 | Kab. Gresik | 22.073.000.000 |
| 135 | Kab. Jember | 29.311.100.000 |
| 136 | Kab. Jombang | 23.732.600.000 |
| 137 | Kab. Kediri | 21.520.800.000 |
| 138 | Kab. Lamongan | 35.180.300.000 |
| 139 | Kab. Lumajang | 19.197.300.000 |
| 140 | Kab. Madiun | 20.418.600.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 141 | Kab. Magetan | 17.713.800.000 |
| 142 | Kab. Malang | 23.881.400.000 |
| 143 | Kab. Mojokerto | 18.891.900.000 |
| 144 | Kab. Nganjuk | 22.240.900.000 |
| 145 | Kab. Ngawi | 27.045.200.000 |
| 146 | Kab. Pacitan | 13.518.400.000 |
| 147 | Kab. Pamekasan | 14.503.400.000 |
| 148 | Kab. Pasuruan | 21.379.200.000 |
| 149 | Kab. Ponorogo | 20.816.600.000 |
| 150 | Kab. Probolinggo | 22.152.400.000 |
| 151 | Kab. Sampang | 18.691.600.000 |
| 152 | Kab. Sidoarjo | 16.884.800.000 |
| 153 | Kab. Situbondo | 20.968.900.000 |
| 154 | Kab. Sumenep | 14.863.000.000 |
| 155 | Kab. Trenggalek | 13.613.000.000 |
| 156 | Kab. Tuban | 23.504.000.000 |
| 157 | Kab. Tulungagung | 17.784.200.000 |
| 158 | Kota Blitar | 4.274.800.000 |
| 159 | Kota Madiun | 4.320.400.000 |
| 160 | Kota Malang | 4.450.800.000 |
| 161 | Kota Pasuruan | 4.372.900.000 |
| 162 | Kota Probolinggo | 4.731.600.000 |
| 163 | Kota Batu | 4.583.900.000 |
| | Jumlah | 636.389.900.000 |
| | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | |
| 164 | Kab. Landak | 16.872.900.000 |
| 165 | Kab. Kapuas Hulu | 12.150.300.000 |
| 166 | Kab. Ketapang | 16.275.300.000 |
| 167 | Kab. Sanggau | 13.542.100.000 |
| 168 | Kab. Sintang | 13.264.000.000 |
| 169 | Kab. Kubu Raya | 21.081.400.000 |
| | Jumlah | 93.186.000.000 |
| | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |
| 170 | Kab. Kapuas | 31.178.900.000 |
| 171 | Kab. Barito Timur | 11.617.400.000 |
| | Jumlah | 42.796.300.000 |
| | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | |
| 172 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 16.398.200.000 |
| 173 | Kab. Balangan | 14.617.300.000 |
| | Jumlah | 31.015.500.000 |
| | PROVINSI SULAWESI UTARA | |
| 174 | Kab. Bolaang Mongondow | 17.442.000.000 |
| 175 | Kab. Minahasa | 12.653.500.000 |
| 176 | Kab. Minahasa Selatan | 12.227.600.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 177 | Kab. Minahasa Utara | 11.103.700.000 |
| 178 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 11.667.800.000 |
| 179 | Kab. Minahasa Tenggara | 11.233.300.000 |
| 180 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | 10.648.300.000 |
| 181 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 10.520.800.000 |
| | Jumlah | 97.497.000.000 |
| | PROVINSI GORONTALO | |
| 182 | Kab. Boalemo | 11.422.700.000 |
| 183 | Kab. Gorontalo | 13.947.700.000 |
| 184 | Kota Gorontalo | 4.269.300.000 |
| 185 | Kab. Pohuwato | 11.023.300.000 |
| 186 | Kab. Bone Bolango | 10.685.800.000 |
| 187 | Kab. Gorontalo Utara | 11.223.000.000 |
| | Jumlah | 62.571.800.000 |
| | PROVINSI SULAWESI TENGAH | |
| 188 | Kab. Banggai | 14.355.200.000 |
| 189 | Kab. Buol | 10.930.200.000 |
| 190 | Kab. Toli-Toli | 12.229.100.000 |
| 191 | Kab. Donggala | 11.822.000.000 |
| 192 | Kab. Morowali | 12.079.800.000 |
| 193 | Kab. Poso | 12.411.400.000 |
| 194 | Kab. Parigi Moutong | 15.202.900.000 |
| | Jumlah | 89.030.600.000 |
| | PROVINSI SULAWESI SELATAN | |
| 195 | Kab. Barru | 12.481.900.000 |
| 196 | Kab. Bone | 27.318.800.000 |
| 197 | Kab. Bulukumba | 14.613.100.000 |
| 198 | Kab. Enrekang | 11.856.400.000 |
| 199 | Kab. Gowa | 17.790.200.000 |
| 200 | Kab. Jeneponto | 13.049.000.000 |
| 201 | Kab. Luwu | 18.913.600.000 |
| 202 | Kab. Luwu Utara | 13.839.700.000 |
| 203 | Kab. Maros | 15.178.900.000 |
| 204 | Kab. Pinrang | 21.731.700.000 |
| 205 | Kab. Sidenreng Rappang | 19.973.900.000 |
| 206 | Kab. Sinjai | 12.437.000.000 |
| 207 | Kab. Soppeng | 15.298.600.000 |
| 208 | Kab. Takalar | 13.231.500.000 |
| 209 | Kab. Tana Toraja | 12.004.600.000 |
| 210 | Kab. Wajo | 25.061.800.000 |
| 211 | Kota Makassar | 4.555.400.000 |
| 212 | Kota Palopo | 4.620.800.000 |
| 213 | Kab. Luwu Timur | 14.913.900.000 |
| 214 | Kab. Toraja Utara | 13.268.500.000 |

| | | |
|---|---|---|
| | Jumlah | 302.139.300.000 |
| | PROVINSI SULAWESI BARAT | |
| 215 | Kab. Polewali Mandar | 13.771.400.000 |
| 216 | Kab. Mamasa | 13.233.700.000 |
| | Jumlah | 27.005.100.000 |
| | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | |
| 217 | Kab. Konawe | 20.587.500.000 |
| 218 | Kab. Kolaka | 13.072.800.000 |
| 219 | Kota Bau-bau | 4.394.700.000 |
| 220 | Kab. Konawe Selatan | 13.176.700.000 |
| 221 | Kab. Kolaka Utara | 10.577.100.000 |
| 222 | Kab. Kolaka Timur | 13.318.500.000 |
| 223 | Kab. Muna Barat | 11.007.600.000 |
| | Jumlah | 86.134.900.000 |
| | PROVINSI BALI | |
| 224 | Kab. Buleleng | 13.678.500.000 |
| 225 | Kab. Gianyar | 14.025.800.000 |
| 226 | Kab. Jembrana | 11.837.200.000 |
| 227 | Kab. Tabanan | 17.011.600.000 |
| | Jumlah | 56.553.100.000 |
| | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | |
| 228 | Kab. Bima | 18.955.700.000 |
| 229 | Kab. Dompu | 14.197.100.000 |
| 230 | Kab. Lombok Barat | 12.659.300.000 |
| 231 | Kab. Lombok Tengah | 21.246.300.000 |
| 232 | Kab. Lombok Timur | 21.662.500.000 |
| 233 | Kab. Sumbawa | 21.168.600.000 |
| 234 | Kota Mataram | 4.780.600.000 |
| 235 | Kota Bima | 4.598.700.000 |
| 236 | Kab. Sumbawa Barat | 12.114.000.000 |
| 237 | Kab. Lombok Utara | 11.762.300.000 |
| | Jumlah | 143.145.100.000 |
| | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | |
| 238 | Kab. Belu | 11.794.700.000 |
| 239 | Kab. Ende | 11.011.100.000 |
| 240 | Kab. Kupang | 11.800.100.000 |
| 241 | Kab. Manggarai | 13.281.300.000 |
| 242 | Kab. Ngada | 10.993.300.000 |
| 243 | Kab. Sikka | 10.510.200.000 |
| 244 | Kab. Sumba Barat | 11.131.100.000 |
| 245 | Kab. Sumba Timur | 410.400.000 |
| 246 | Kab. Timor Tengah Selatan | 098.100.000 |
| 247 | Kab. Timor Tengah Utara | 11.178.500.000 |
| 248 | Kab. Rote Ndao | 11.829.300.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 249 | Kab. Manggarai Barat | 12.819.900.000 |
| 250 | Kab. Nagekeo | 11.584.900.000 |
| 251 | Kab. Sumba Barat Daya | 11.558.700.000 |
| 252 | Kab. Sumba Tengah | 10.705.200.000 |
| 253 | Kab. Manggarai Timur | 12.420.400.000 |
| | Jumlah | 186.127.200.000 |
| | PROVINSI MALUKU | |
| 254 | Kab. Buru | 11.624.400.000 |
| 255 | Kab. Seram Bagian Barat | 10.261.200.000 |
| 256 | Kab. Seram Bagian Timur | 10.355.700.000 |
| | Jumlah | 32.241.300.000 |
| | PROVINSI MALUKU UTARA | |
| 257 | Kab. Halmahera Timur | 11.653.400.000 |
| | Jumlah | 11.653.400.000 |
| | PROVINSI PAPUA | |
| 258 | Kab. Nabire | 10.444.200.000 |
| | Jumlah | 10.444.200.000 |
| | PROVINSI PAPUA BARAT | |
| 259 | Kab. Manokwari | 10.775.900.000 |
| | Jumlah | 10.775.900.000 |
| | Jumlah Kab/Kota | 259 |
| | Total Pagu | 4.000.000.000.000 |